

# Perempuan sebagai Kata Kerja

*Oleh A.P. Edi Atmaja*

Perempuan tengah menjadi isu utama di media massa dewasa ini. Angelina Sondakh, Afriyani Susanti, Miranda Swaray Goeltom, Rosa Manullang, dan Malinda Dee diperbincangkan sesanter Rasminah dan Whitney Houston. Perempuan-perempuan itu terlarut dalam dinamika pemberitaan di negeri ini. Kuasa media telah memosisikan mereka sedemikian rupa sebagai sebuah kata kerja.

Kata kerja itu ditegaskan lewat proposisi masyhur Simone de Beauvoir (1908-1986): *“One is not born, but rather becomes, a woman.”* Seorang perempuan tak dilahirkan *sebagai* perempuan, melainkan *menjadi* perempuan. Perempuan, dalam artian itu, mestilah dinamis sekaligus progresif, yang menolak segala belenggu patriarkis.

Sebagai kata kerja, status ketujuh perempuan tadi bukannya sama persis. Nama-nama yang disebut di depan memperoleh tempat yang apes di mata rakyat kalau dibandingkan dengan nama-nama yang disebut belakangan. Angelina, Miranda, Rosa, dan Malinda tersangkut perkara korupsi yang mencoreng rasa keadilan rakyat. Sementara keteledoran Afriyani yang merenggut belasan nyawa itu nyaris tak bisa rakyat maafkan.

Di sisi lain, kasus Rasminah telah membikin hati rakyat miris dan semakin tak percaya akan kemampuan hukum di negeri ini. Betapa hukum dengan tega, berulang kali, menindas rakyat kecil seperti Rasminah.

Di antara perempuan-perempuan itu, bolehlah Whitney Houston kita anggap tengah menempati posisi “abu-abu”. Kematianya ditangisi berjuta manusia kendati caranya menjemput mati yang lantaran obat-obatan terlarang itu pantas disesali juga.

Namun, di atas semua asumsi-asumsi di atas, tak salahlah kalau dikatakan bahwa perempuan-perempuan tersebut telah mencitrakan dengan bagus kedudukan mereka sebagai sebuah kata kerja, sekurang-kurangnya dalam sorotan media massa.

## **Negatif**

Perempuan Indonesia masa kini relatif memiliki peluang di segala lini kehidupan. Pekerjaan yang kian beranekaragam tak lagi menampik keterlibatan perempuan. Sejauh mampu, perempuan Indonesia sah-sah saja memilih profesi yang ia kehendaki. Hal itu dijamin Pasal 27 ayat (2) dan 28 E ayat (1) konstitusi kita.

Semakin banyak perempuan menjamah profesi yang di masa lalu jarang atau bahkan tak pernah terpikirkan akan disandang perempuan. Profesi-profesi seperti sopir angkutan umum, politisi, hakim, jaksa, pegiat HAM, satpam, atau tukang parkir tak lagi dimonopoli kaum lelaki—kendati mereka tentu saja masih mendominasi.

Kalau kita menilik lintasan sejarah nasional, akan tampak peran besar perempuan dalam rangka mewujudkan kemerdekaan. Peran itu muncul jauh sebelum zaman pergerakan nasional menggelora,

yakni tatkala era kolonial. Di masa itu, kita mengenal, antara lain, Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, RA Kartini, Martha Christina Tiahahu, Cut Nyak Meutia, dan Maria Walanda Maramis.

Perempuan-perempuan itu adalah pejuang di masanya. Pemimpin pergerakan yang mengatasi peran lelaki sekalipun. Perempuan-perempuan itu bergerak, berjuang, memimpin, dan menyertai lelaki demi kemerdekaan bangsa. Sebagai kata kerja, merekalah contoh bagus dari kata kerja aktif yang positif.

Sementara itu, masih dalam lintasan sejarah nasional, kita melihat peran perempuan yang demikian besar itu cenderung mengendur tatkala kemerdekaan justru telah terengkuh. Dua rezim pemerintahan terlama di negeri ini, Orde Lama dan Orde Baru, tidak mematri nama perempuan yang terekam kuat dalam ingatan. Kalau pun ada, ia sebatas dimunculkan sebagai reaksi atas otoriterisme penguasa, semisal Marsinah. Kata kerja pasif pantas kita terakan sebagai kedudukan perempuan di masa itu.

Reformasi 1998 telah membuka keran kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali perempuan. Hak asasi perempuan, yang sebelumnya kurang diakui negara, mendapatkan pengakuan dengan diamendemennya konstitusi hingga empat kali.

Kemunculan tokoh publik seperti Angelina Sondakh adalah berkat semakin majunya pemahaman tentang perempuan beserta hak-haknya di masyarakat kita. Kian banyak perempuan yang diakomodasi kepentingannya melalui lembaga-lembaga pemerintahan. Kian bebas mereka beraktivitas di tengah kaum lelaki.

Namun, dengan melihat kasus-kasus korupsi masa kini, yang justru terduga atau telah terbukti dilakoni perempuan, menunjukkan kepada kita bahwa kedudukan perempuan telah bergeser lagi menjadi kata kerja aktif yang negatif.

## Catatan

Benarlah apa yang dikatakan Tri Marhaeni Pudji Astuti dalam *"Superwoman" dalam Gugatan Familialisme (Suara Merdeka, 15/5/2012)*. Dalam esainya, guru besar antropologi Universitas Negeri Semarang itu mempersoalkan pandangan masyarakat tentang multiperan perempuan. Bahwa perempuan mesti mampu menjadi *superwomen*: seimbang antara aktivitas di dalam dan di luar rumah.

Pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan harus tetap diam di rumah, menjadi sosok yang penurut dan manut, semestinya segera diganti dengan pandangan bahwa perempuan harus sudah mulai berorientasi ke global, luar rumah, dan menjadi perempuan bekerja yang mandiri.

Saya sepenuhnya setuju pendapat ini. Apalagi kalau kita melihat kenyataan bahwa saat ini justru banyak perempuan yang menjadi penopang ekonomi keluarga, pencari nafkah yang utama. Banyak pula perempuan yang menjadi ibu tunggal bagi anaknya sehingga kesadaran masyarakat dan lingkungan kerja mutlak diperlukan untuk mendukung kenyataan ini.

Namun, kebebasan yang kini diperoleh perempuan—yang mana tak dinikmati pendahulu mereka di masa lampau—semestinya disikapi dengan positif. Perempuan pantas diberi hak yang setara dan diperlakukan sederajat dengan kaum lelaki, tapi dengan catatan: ia mesti melawan kebobrokan bangsa dengan kekuatan yang dimilikinya, bukan malah terlibat dalam kebobrokan yang kerap dan banyak dibuat kaum lelaki itu. [18022012, 10.22]

\*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh harian *Analisa* pada 3 April 2012.